

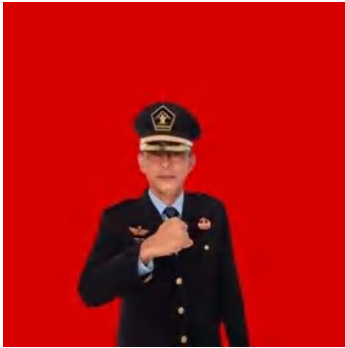
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III PARIGI

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, LKjIP Tahun Anggaran 2022 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 ini telah selesai disusun. Sasaran Kinerja Tahun Anggaran 2022 ini merupakan evaluasi dari Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi untuk Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi Tahun 2022 ini adalah wujud akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan, yaitu mewujudkan tujuan system Pemasyarakatan dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia dengan melaksanakan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Laporan LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja selama tahun 2022 serta berkaitan dengan tahun sebelumnya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi secara maksimal berupaya melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024.

Dalam Laporan ini disajikan informasi tentang tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, masalah yang dihadapi, hasil pencapaian tahun sebelumnya, penetapan kinerja, perencanaan kinerja kegiatan, pengukuran kinerja kegiatan sehingga menggambarkan tentang sejauh mana efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana, sumber daya manusia, sarana pendukung lainnya termasuk memuat faktor-faktor yang mendukung keberhasilan serta hambatan-hambatan yang menyertainya.

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi tahun 2022 ini, dapat menjadi pendorong peningkatan kinerja dan koreksi yang membangun, selain itu diharapkan menjadi sarana komunikasi efektif bagi semua pihak yang berkepentingan dalam mengimplementasikan pelaksanaan program dan kegiatan di Lapas Kelas III Parigi, ini semua sebagai upaya menjaga transparansi dan kepercayaan publik agar pengelolaan pemerintahan akuntabel, transparan dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan visi misi pemasyarakatan.



Kepala,

Didik Niryanto, A.Md.I.P.,S.A.P.
NIP. 19710131 199403 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi Organisasi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Pengertian Tusi Dalam Struktur	4
E. Permasalahan dan Capaian Kinerja	4
A. Permasalahan	4
B. Capaian	5
C. Dasar Hukum	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis	6
B. Perjanjian Kinerja	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	7
A. Capaian Kinerja Organisasi	7
B. Realisasi Anggaran	7
BAB IV PENUTUP	10
A. Kesimpulan	10
B. Rencana Tindak Lanjut Capaian Kinerja	10

RINGKASAN EKSEKUTIF

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi merupakan unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Lembaga pemasyarakatan Kelas III Parigi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M.05-PR07.10 tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman, yang sebelumnya bernama Lembaga Pemasyarakatan Parigi berdasarkan Surat instruksi Direktorat pemasyarakatan Nomor : J.H.G 8/506 tanggal 17 juni 1994 berubah menjadi Cabang Rumah Tahanan Negara Palu di Parigi beradadi kelurahan Maesa Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong sejak tahun 1991 berpindah tempat di jalan Kuda Laut No. 2 desa Olaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya dengan keluarnya keputusan Menteri Hukum dan HAM tahun 2020 Cabang Rumah Tahanan Palu di Parigi berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi.

Sebagai instansi vertikal Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung mengemban tugas dibidang hukum dan HAM dengan membangun hukum sebagai panglima yang memberikan rasa aman, adil, dan kepastian, untuk mendukung terwujudnya visi, dan pelaksanaan misi Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Visi dan Misi Presiden RI Tahun 2020 - 2024



Visi

Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong

Misi

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan yang diarahkan dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan nasional maka ditetapkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Visi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tiga Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Misi Nomor 6, Nomor 7 dan Nomor 8 yang kemudian diterjemahkan kedalam 7 Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Pemasarakatan; dan
7. Melaksanakan tata laksana Pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 (Renstra 2020-2024) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Kantor Wilayah dengan Unit Pelaksana Teknis untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan
2. Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasarakatan di Wilayah Sesuai Standar

3. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di Wilayah Sesuai Standar
4. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di Wilayah Sesuai Standar
5. Meingkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai standar
6. Layanan Dukungan Manajemen.

Selama periode tahun 2022, telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja antara Kantor Wilayah Sulawesi Tengah dengan Lapas Kelas III Parigi. Dari total 15 target indikator kinerja Lapas Kelas III Parigi, hasil pencapaian seluruh indikator kinerja Lapas Kelas III Parigi pada periode tahun 2022 yaitu sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 99,95%.

Keberhasilan capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi pada tahun 2022 ini juga dibuktikan dengan prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Kantor Wilayah dan UPT di Lingkungan Kantor Wilayah Sulawesi Tengah selama tahun 2022 diantaranya :

- Meraih Penghargaan Terbaik I Nilai IKPA TA. 2021 oleh Kementerian Keuangan Direktur Jenderal Perbendaharaan
- Meraih Penghargaan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan Nilai 100 (seratus) dalam Kategori Satker Kecil pada semester 1 Tahun 2022 dari Kementerian Keuangan Direktur Jenderal Perbendaharaan.



CAPAIAN KINERJA LAPAS KELAS III PARIGI

No	Kegiatan Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Output Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup	Presentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75	75	Melakukan Pemenuhan Makanan bagi Narapidana/Tahanan
		Presentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara	93	93	Memberikan layanan kesehatan secara berkualitas kepada seluruh Tahanan/Narapidana

	Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	berkualitas			
		Presentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96	96	Tidak terdapat tahanan maupun narapidana wanita pada Lapas Parigi
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70	70	menangani WBP yang mengalami gangguan mental
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80	80	Memberikan layanan kesehatan kepada semua WBP lansia sesuai standar
		Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80	80	Memberikan layanan kesehatan kepada 1 orang WBP disabilitas
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70	70	Tidak terdapat WBP yang mempunyai penyakit HIV-AIDS dan TB Positif
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba	25	25	melakukan pembinaan kepada WBP pecandu narkoba
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65	65	melakukan penilaian kepribadian terhadap WBP
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98	98	Telah memberikan hak remisi kepada seluruh Narapidana yang memenuhi syarat
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80	80	Telah memberikan hak integrasi kepada seluruh Narapidana yang memenuhi syarat
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80	80	Memberikan hak pendidikan kepada 2 Orang Narapidana anak

		Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	15	15	Melakukan pembinaan terhadap WBP resiko tinggi sehingga berubah perilakunya
		Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28	28	Telah memberikan pelatihan kepada Narapidana yang memenuhi syarat
		Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif	67	67	melakukan pembinaan terhadap narapidana yang produktif
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai Standar	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Standar	80	80	Menindaklanjuti semua pengaduan dari WBP
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70	70	Melakukan deteksi dini terhadap upaya gangguan Kamtib
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80	80	memberikan pembinaan dan menjatuhkan sanksi bagi pelaku gangguan kamtib
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70	70	melakukan pemulihan situasi terhadap gangguan kamtib yang terjadi
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1	1	Telah menyusun matriks kebutuhan anggaran untuk TA 2023
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1	1	Melakukan penatausahaan terhadap seluruh BMN di Satker
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1	1	melakukan peningkatan kompetensi pegawai dengan memberi kesempatan mengikuti Bimtek secara daring
		Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1	1	melakukan pelaksanaan anggaran sesuai prosedur dan membuat laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku
		Jumlah Layanan Perkantoran	1	1	melakukan pembayaran gaji pegawai dan melaksanakan pemeliharaan kantor serta fasilitas perkantoran
		Jumlah Kendaraan Bermotor	0	0	Tidak terdapat pengadaan kendaraan bermotor

		Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	10	10	Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan II
		Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	26	26	Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan II
		Jumlah Gedung/Bangunan	0	0	Tidak terdapat rehabilitasi atau pengadaan bangunan baru pada Lapas Parigi

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi merupakan unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Lembaga pemasyarakatan Kelas III Parigi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M.05-PR07.10 tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman, yang sebelumnya bernama Lembaga Pemasyarakatan Parigi berdasarkan Surat instruksi Direktorat pemasyarakatan Nomor : J.H.G 8/506 tanggal 17 Juni 1994 berubah menjadi Cabang Rumah Tahanan Negara Palu di Parigi berada di kelurahan Maesa Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong sejak tahun 1991 berpindah tempat di Jalan Kuda Laut No. 2 desa Olaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya dengan keluarnya keputusan Menteri Hukum dan HAM tahun 2020 Cabang Rumah Tahanan Palu di Parigi berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi didukung oleh sumber dayam manusia dengan jumlah pegawai 50 pegawai yang tersebar pada 4 subseksi.

B. Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
3. Melakukan bimbingan social/kerohanian narapidana/anak didik
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

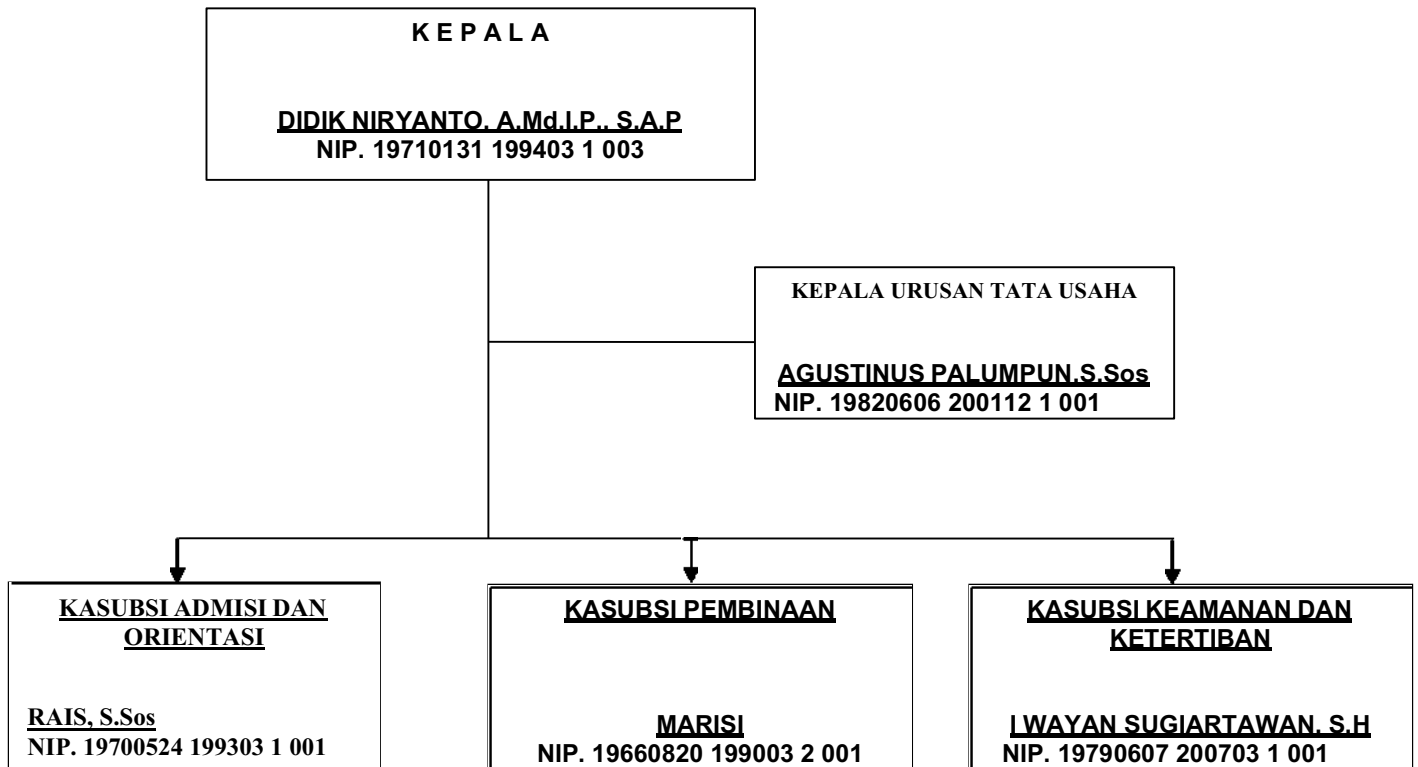
C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi terdiri atas :

1. Kepala Lapas;
2. Kepala Urusan Tata Usaha;
3. Kepala Subseksi Admisi Orientasi;
4. Kepala Subseksi Pembinaan; dan
5. Kepala Subseksi Keamanan dan Ketertiban.

Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi dapat digambarkan pada diagram di bawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI LAPAS KELAS III PARIGI



D. PENGERTIAN TUSI DALAM STRUKTUR

Pada tingkatan di bawah Kepala Lapas terdapat empat Eselon V yang masing- masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Urusan Tata Usaha

Tugas:

Melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.

b. Subseksi Admisi dan Orientasi

Tugas:

Melakukan registrasi dan data base, penilaian dan pengklasifikasian, layanan informasi dan penerimaan pengaduan.

c. Subseksi Pembinaan

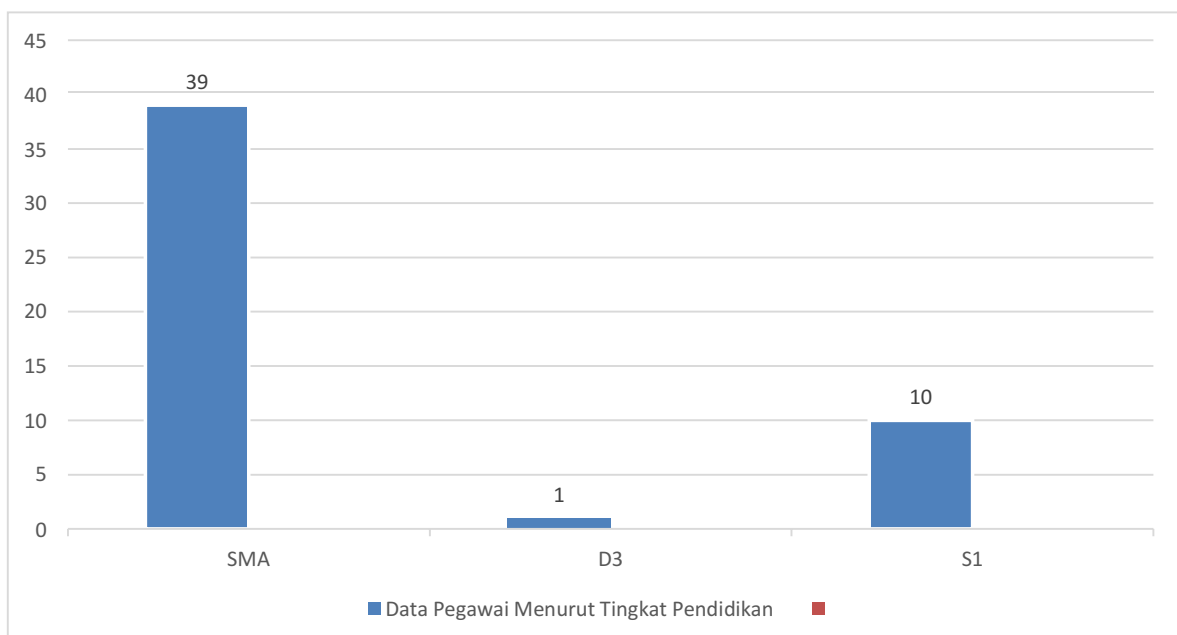
Tugas:

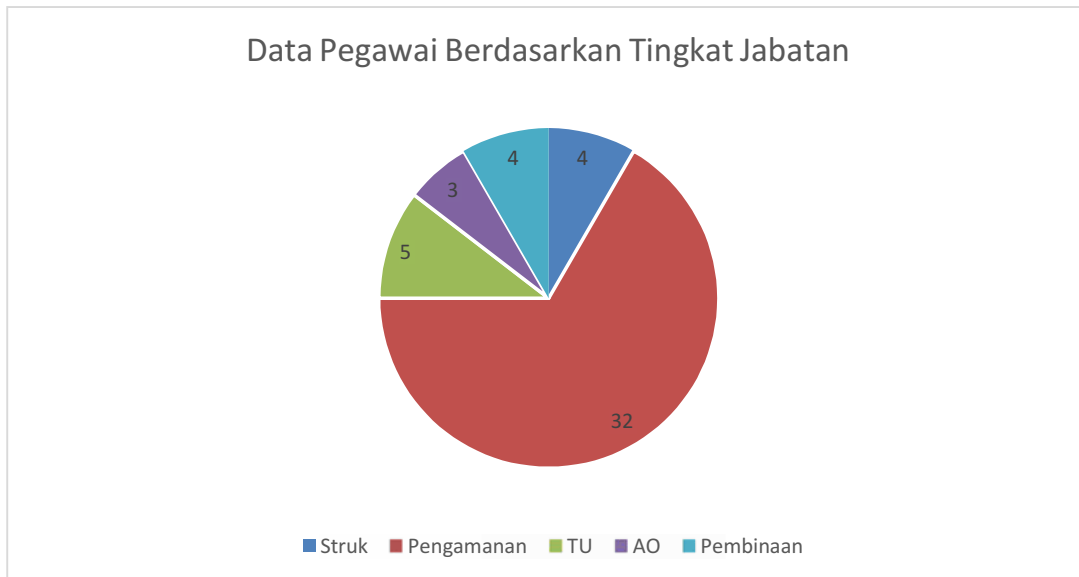
Melakukan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, bimbingan kemasyarakatan, pelayanan makanan dan perlengkapan narapidana dan pelayanan Kesehatan.

d. Subseksi Keamanan dan Ketertiban

Tugas:

Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban, pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban.





E. PERMASALAHAN DAN CAPAIAN

A. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi selama tahun 2022, terdapat beberapa kendala yang menghambat pencapaian tujuan organisasi antara lain :

- Potensi Gratifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- Kurangnya SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas Kelas III Parigi
- Koordinasi di segala aspek yang belum maksimal; dan
- Fungsi Kehumasan belum maksimal karena belum adanya pagu alokasi untuk kehumasan
- Sarana dan Prasarana yang belum memadai

B. Capaian

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mencari jalan keluar dari masalah yang di hadapi dalam proses penyelenggaraan kinerja program dan kegiatan Lapas Kelas III Parigi adalah:

1. Membentuk Tim UPG (Unit Pengendali Gratifikasi) sesuai dengan Permenkumham Nomor 58 Tahun 2016
2. Melaksanakan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
3. Senantiasa menyampaikan informasi mengenai komitmen dan aturan yang ada kepada aparat/intansi penegak hukum;
4. Pelaporan kinerja belum tepat waktu. Hal ini disebabkan karena belum ada pegawai yang pernah mengikuti Bimtek atau Diklat pembuatan Laporan Kinerja (LKjIP)
5. Mengusulkan penambahan anggaran program publikasi di pagu alokasi untuk memperkuat kualitas dan kuantitas fungsi kehumasan
6. Mengadakan pelatihan-pelatihan masyarakatan yang berkaitan dengan tugas langsung di lapangan demi meningkatkan kualitas petugas yang ada.
7. Membuat mekanisme layanan informasi pelayanan integrasi;
8. Mengadakan penambahan pada anggaran untuk sarana dan prasarana agar lebih memadai.

C. Dasar Hukum

Yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lapas Kelas III Parigi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HM-01.PR.01.01 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan kementerian Hukum dan HAM 2020-2024.

BAB. II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dalam suatu organisasi perencanaan itu sangat penting karena di gunakan untuk mencapai tujuan suatu organisasi serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi karena tanpa suatu perencanaan fungsi suatu organisasi, pengontrolan, pengarahan tidak akan dapat berjalan.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET	
			2021	2022
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan Pembinaan Kemandirian Narapidana	99,63%	100%
	Operasi Bidang Keamanan	Layanan Keamanan dan Ketertiban		
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN Layanan Humas Layanan Umum Layanan Perkantoran	99,34%	99,93%
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	100%	98,18%
	Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	100%	100%
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Layanan Pemantauan dan Evaluasi Layanan Manajemen Keuangan Layanan Reformasi Kinerja	100%	100%

Dengan melihat sasaran kerja untuk tahun 2022 terjadi peningkatan pada semua indikator. Penetapan kinerja dan rencana kerja serta anggaran Lapas Kelas III Parigi disokong dari biaya APBN (DIPA) tahun anggaran 2022. Rincian rencana kinerja tersebut dipaparkan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	ANGGARAN
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	586 Orang	3.847.070.000,-
	Operasi Bidang Keamanan	12 Operasi	2.491.390.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4 Layanan	3.228.262.000,-
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	12 Bulan	100.000.000,-
	Layanan Manajemen SDM Internal	41 Orang	30.880.000,-
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	7 Dokumen	50.715.000,-

Perjanjian kinerja merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja, evaluasi kinerja aparatur dan pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Perjanjian kinerja tahun 2022 disusun mengacu kepada kedudukan, tugas, dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020-2024. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian 2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi 3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan 4. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin 	70%
2	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	70%
3	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Nilai IKPA/Nilai SMART	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Hukum dan HAM RI yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja (LKj) yang berpedoman pada peraturan yang berlaku. LKj Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil atau belum terlaksana pada periode atau tahun tersebut sehingga dapat menjadi pedoman, acuan dan prioritas pada perjanjian kinerja pada tahun berikutnya.

Penjabaran Akuntabilitas Kinerja suatu instansi menunjukkan adanya keterbukaan informasi menyangkut manajemen internalnya. Untuk itu, berikut ini disajikan laporan akuntabilitas kinerja dan percepatan realisasi anggaran Lapas Kelas III Parigi Tahun Anggaran 2022, ringkasan percepatan realisasi anggaran T.A 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Kegiatan :

1. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Rp. 3.523.520.000,-
- Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana	Rp. 157.650.000,-
- Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	Rp. 3.308.420.000,-
- Pembinaan Kemandirian Narapidana	Rp. 57.450.000,-
2. Operasi Bidang Keamanan	Rp. 34.640.000,-
- Layanan Keamanan dan Ketertiban	Rp. 34.640.000,-
3. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 3.609.930.000,-
- Layanan BMN	Rp. 12.725.000,-
- Layanan Hubungan Masyarakat	Rp. 620.000,-
- Layanan Umum	Rp. 37.320.000,-
- Layanan Perkantoran	Rp. 3.559.265.000,-
4. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 100,000,000
- Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp. 76.697.000,-
- Peralatan Fasilitas Perkantoran	Rp. 23.303.000,-

5. Layanan Manajemen SDM Internal	Rp. 30.880.000,-
- Layanan Manajemen SDM	Rp. 30.880.000,-
6. Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp. 50.715.000,-
- Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 9.515.000,-
- Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp. 680.000,-
- Layanan Manajemen Keuangan	Rp. 21.560.000,-
- Layanan Reformasi Kinerja	Rp. 18.960.000,-

URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	3,558,160,000	3,558,160,000	0
BF.5252 Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	3,558,160,000	3,558,160,000	0
BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3,523,520,000	3,523,520,000	0
BDC.002 Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana	157,650,000	157,650,000	0
051 Pembinaan Kepribadian	150,400,000	150,400,000	0
052 Layanan Integrasi dan TPP	7,250,000	7,250,000	0
BDC.004 Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	3,308,420,000	3,308,420,000	0
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	3,308,420,000	3,308,420,000	0
BDC.S01 Pembinaan Kemandirian Narapidana	57,450,000	57,450,000	0
051 Perencanaan	1,280,000	1,280,000	0
052 Pelaksanaan	52,300,000	52,300,000	0
053 Evaluasi dan Pelaporan	3,870,000	3,870,000	0
BHB Operasi Bidang Keamanan	34,640,000	34,640,000	0
BHB.002 Layanan Keamanan dan Ketertiban	34,640,000	34,640,000	0
051 Penegakan Keamanan dan Ketertiban	23,640,000	23,640,000	0
052 Pengawasan	11,000,000	11,000,000	0
WA Program Dukungan Manajemen	3,791,525,000	3,787,691,166	3,833,834
WA.6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	3,791,525,000	3,787,691,166	3,833,834
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,609,930,000	3,606,660,466	3,269,534
EBA.956 Layanan BMN	12,725,000	12,720,000	5,000
051 Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	11,355,000	11,350,000	5,000
052 Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	1,370,000	1,370,000	0
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	620,000	620,000	0
051 Penyediaan Informasi Publik	620,000	620,000	0
EBA.962 Layanan Umum	37,320,000	37,320,000	0
051 Urusan Umum	13,320,000	13,320,000	0
052 Fasilitasi Kerja New Normal	24,000,000	24,000,000	0
EBA.994 Layanan Perkantoran	3,559,265,000	3,556,000,466	3,264,534
001 Gaji dan Tunjangan	2,705,565,000	2,702,313,334	3,251,666
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	853,700,000	853,687,132	12,868
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100,000,000	99,440,700	559,300
EBB.951 Layanan Sarana Internal	100,000,000	99,440,700	559,300
051 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	76,697,000	76,286,100	410,900
053 Peralatan Fasilitas Perkantoran	23,303,000	23,154,600	148,400
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	30,880,000	30,880,000	0
EBC.954 Layanan Manajemen SDM	30,880,000	30,880,000	0
051 Pembinaan Kepegawaian	30,880,000	30,880,000	0
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	50,715,000	50,710,000	5,000
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	9,515,000	9,515,000	0
051 Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran	9,515,000	9,515,000	0
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	680,000	680,000	0
051 Penyusunan Laporan Kinerja	680,000	680,000	0
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	21,560,000	21,555,000	5,000
051 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	21,560,000	21,555,000	5,000
EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	18,960,000	18,960,000	0
051 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM)	18,960,000	18,960,000	0

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 ini. LAKIP Tahun Anggaran 2022 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian kegiatan dan program Lapas Kelas III Parigi.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas selama Tahun 2022 pada Lapas Kelas III Parigi telah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun, tetap tidak mampu dielakkan bahwa hal-hal internal dan mendasar masih menjadi kendala. Hambatan- hambatan tersebut berupa :

1. Kuantitas petugas yang sangat kurang;
2. Kualitas SDM yang kurang optimal;
3. Koordinasi disegala aspek yang belum dapat maksimal; dan
4. Sarana dan prasarana yang belum memadai.

B. RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, maka kiranya Kantor Wilayah mampu membantu dalam hal pengadaan. Bantuan-bantuan tersebut berupa :

1. Peningkatan kualitas pelayanan berupa renovasi ruang tunggu besukan, ruang besukan dan pelayanan yang lebih berbasis HAM, Ramah Lansia, Anak dan Disabilitas;
2. Meningkatkan program pembinaan, pendidikan dan pelatihan kemandirian untuk Warga Binaan Pemasarakatan;
3. Mengadakan pelatihan-pelatihan pemsarakatan yang berkaitan dengan tugas langsung di lapangan demi meningkatkan kualitas petugas yang ada;
4. Mengadakan penambahan anggaran untuk sarana dan prasarana agar lebih memadai dari apa yang ada sekarang.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III PARIGI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Didik Niryanto, A.Md.I.P., S.A.P.
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Lilik Sujandi, Bc.IP.,S.IP.,M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah

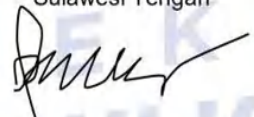
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 12 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Sulawesi Tengah


Lilik Sujandi, Bc.IP.,S.IP.,M.Si
NIP. 197110171995031001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas III Parigi


Didik Niryanto, A.Md.I.P., S.A.P.
NIP. 197101311994031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III PARIGI
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	75
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Klien Pemasarakatan		
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	75% 93% 96% 70% 80% 80% 70% 25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian 2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	65% 98%

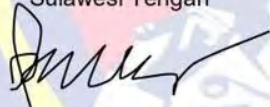
	Resiko Tinggi	3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%	
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	
		3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	
3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%			
4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%			
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann	
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan	
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	0 Unit	
		7. Jumlah Perangkat Pengolah data dan komunikasi	5 Unit	
		8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	26 Unit	
		9. Jumlah gedung / bangunan	0 Unit	

DEK
JANJI KINERJA 2022

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 3,890,370.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 3,890,370.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3,409,857.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 3,409,857.000,-

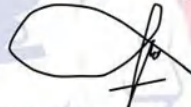
Palu, 12 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Sulawesi Tengah



Lilik Sujandi, Bc.IP.,S.IP.,M.Si
NIP. 197110171995031001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasarakatan
Kelas III Parigi



Didik Niryanto, A.Md.I.P., S.A.P.
NIP. 197101311994031001

DEKLARASI
JANJI KINERJA 2022



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III PARIGI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Didik Niryanto, A.Md.I.P., S.A.P.
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palu, 12 Januari 2022

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas III Parigi

Didik Niryanto, A.Md.I.P., S.A.P.
NIP. 197101311994031001

DEKLARASI
PERJANJIAN KINERJA 2022